

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

- Instansi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 Visi Walikota : Pasuruan Kota Madinah "Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya"  
 Misi Walikota : 1. Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan  
 2. **Membangun Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan**  
 3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tanggung serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata  
 4. Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif
- Tugas : Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.  
 Fungsi : a. Penyusunan perencanaan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;  
 b. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;  
 c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;  
 d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;  
 e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;  
 f. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;  
 g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan  
 h. pembinaan terhadap UPT

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
Tujuan 1: Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah	Scoring pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	70	Nilai PMPRB	SEKRETARIAT	
Sasaran 1: Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Merupakan Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP atas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	78	LHE Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Kota Pasuruan	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Merupakan persentase temuan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{Temuan anggaran yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah}}{\sum \text{Temuan anggaran oleh BPK}} \times 100$	100%	Tanggapan temuan BPK	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	Merupakan persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan terhadap sasaran Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{Realisasi Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD}}{\sum \text{Program Dukungan Sasaran SKPD}} \times 100$	100%	data money Sekretariat	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk dari indikator indeks kualitas jalan, indeks layanan drainase dan indeks penataan ruang	$(50\% \times \text{indeks kualitas jalan}) + (40\% \times \text{indeks layanan drainase}) + (10\% \times \text{Indeks Penataan Ruang})$	81,95%	1. Jalan dan bangunan pelengkap Kondisi Mantab 2. Jembatan Kondisi Mantab 3. Irigasi Kondisi Baik 4. Drainase Kondisi Baik 5. Kesesuaian pemanfaatan ruang 6. Dokumen ketataruangan yang disusun	BIDANG BINA MARGA, BIDANG TATA RUANG, PBIDANG ENATAAN BANGUNAN DAN BINA KONSTRUKSI, BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	
	Indeks Kualitas Jalan	Indeks Kualitas Jalan dibentuk dari indikator persentase jalan kota dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik dan sedang serta indikator persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	$(70\% \times \% \text{Jalan Kota dan Bangunan Pelengkapnya dalam Kondisi Baik dan Sedang}) + (30\% \times \% \text{Jembatan dalam kondisi baik dan sedang})$	77,50%	1. Hasil Survey Kondisi Jalan dan Jembatan tiap tahun 2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/237/423.011/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/182/423.011/2018 tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Pasuruan	BIDANG BINA MARGA	

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET 2023	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Layanan Drainase	Indeks Layanan Drainase dibentuk dari persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik serta persentase drainase dalam kondisi baik. Indeks layanan drainase memudahkan pemerintah untuk mengukur dan membandingkan dampak dari penggunaan APBD dalam pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan drainase	$\frac{\% \text{Irigasi Kondisi Baik} + \% \text{Drainase Kondisi Baik}}{2}$	82,46%	1. Hasil Survey Kondisi Jaringan Irigasi dan Drainase tiap tahun 2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/279/423.011/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/311/423.011/2019 tentang Penetapan Status Jaringan Irigasi Sumber Daya Air dan Drainase	BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	
	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara dibentuk dari jumlah Gedung negara dalam kondisi baik dan jumlah Gedung negara yang dibutuhkan. Indeks kualitas bangunan Gedung negara memudahkan pemerintah untuk mengukur dan membandingkan dampak dari penggunaan APBD dalam pembangunan Gedung negara	$\frac{\sum \text{Gedung Negara dalam Kondisi Baik}}{\sum \text{Gedung Negara yang Dibutuhkan}} \times 100$	61,51%	1. Survey jumlah gedung negara yang dibutuhkan pada tahun 2020 ditambah proyeksi kebutuhan gedung negara 2. Survey kondisi gedung negara tiap tahun	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN BINA KONSTRUKSI	
	Indeks Penataan Ruang	Indeks Penataan Ruang dibentuk dari persentase Kawasan yang mempunyai rencana detail dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang. Indeks penataan ruang memudahkan pemerintah untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW serta berapa jumlah rencana detail yang dimiliki oleh Kota Pasuruan	$(70\% \times \% \text{Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang}) + (30\% \times \% \text{Kawasan yang Mempunyai Rencana Detail})$	74,47%	1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasuruan Tahun 2021 - 2041 2. Jumlah Dokumen Ketataruangan yang disusun selama tahun 2022-2026	BIDANG TATA RUANG	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA PASURUAN

  
GUSTAP PURWOKO, ST, MT  
Pembina TK. I  
NIP. 19670824 199803 1 005